

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

Akhir Polemik Bantuan Sosial Jakarta

Sempat 'Perang Kata' secara terbuka Pemerintah Pusat dan DKI akhirnya sepakat menyalurkan bantuan untuk 2,15 juta warga bu Kota.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah pusat dan DKI Jakarta berusaha mengakhiri polemik seputar penyaluran bantuan sosial untuk warga Ibu Kota yang terkena dampak pandemi Covid-19. Kedua pihak sepakat untuk segera menyalurkan santunan berupa bahan pokok kepada 2,15 juta keluarga miskin dan rentan miskin di Jakarta.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah DKI akan membagikan bantuan sosial bagi 853.196 keluarga. Adapun 1,3 juta keluarga lainnya bakal mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. "Menurut saya, dengan adanya kesepakatan di atas, masalahnya sudah selesai," ujar dia kepada *Tempo*, kemarin.

Polemik tentang penyaluran bantuan sosial untuk warga yang terkena dampak Covid-19 memanasi sejak pekan lalu. Sejumlah menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo melontarkan pernyataan yang mempersoalkan komitmen pemerintah Jakarta untuk membantu warganya.

Menteri Sosial Juliari

Batubara, misalnya, menyebutkan pembagian santunan di Ibu Kota tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta. Ia menyebutkan ada keluarga yang menerima bantuan "ganda", baik dari pemerintah DKI maupun Kementerian Sosial.

Ihwal kesepakatan awal itu, Juliari merujuk pada rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, pada 30 Maret lalu. Kala itu, pemerintah DKI menyebutkan terdapat 1,1 juta orang miskin dan 2,6 juta orang rentan miskin di Ibu Kota yang perlu mendapat santunan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian melanjutkan pembahasan hal itu bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada 2 April lalu. Waktu itu, Anies menyatakan pemerintah DKI sanggup memberi bantuan kepada 1,1 juta warga miskin. Adapun untuk 2,6 juta warga rentan miskin akibat wabah Covid-19, Anies meminta bantuan pemerintah pusat. Kedua pihak menyetujui usul tersebut.

Pemerintah DKI telah menyalurkan bantuan sosial berupa bahan kebutuhan pokok sejak 9 April 2020, sehari sebelum pemberlakuan pem-

batasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Pemerintah Jakarta terus menyalurkan bantuan hingga 25 April lalu. Pada tahap pertama ini, DKI juga menyalurkan bantuan untuk warga rentan miskin yang seharusnya mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat baru mendistribusikan bantuan Presiden pada 20 April lalu.

Kesalahpahaman mencaut ketika pemerintah pusat mulai menyalurkan bantuan tahap pertama. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazrudin menuturkan, sejak awal, pemerintah DKI bersepakat agar tidak ada penyaluran bantuan yang tumpang-tindih. Faktanya, kata dia, Kementerian justru menemukan adanya duplikasi penerima santunan dari DKI dan bantuan Presiden.

Anggota Tim Gubernur DKI Jakarta untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Muhammad Imam Adli, mencoba menjernihkan persoalan. Lima hari setelah rapat Anies dengan Ma'ruf Amin, menurut dia, pemerintah DKI menyerahkan data calon penerima bantuan ke Kementerian Sosial. Tapi datanya bukan lagi nama perorangan, melainkan per-

keluarga. Sebagian dari mereka merupakan keluarga yang juga mendapat santunan dari DKI. "Benar ada duplikasi karena memang datanya sama, kecuali dari Kemensos *men-take out* atau menambahkan data," katanya Jumat lalu.

Pada rapat pada 4 Mei lalu, Menteri Muhadjir Effendy sempat bersitegang dengan Gubernur Anies Baswedan. Muhadjir mempersoalkan data penerima bantuan Presiden yang sama dengan penerima bantuan sosial dari



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 0 2 0

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Media Online	
Media Cetak	Koran Tempo

DKI Berupaya Mengurangi Defisit dengan Menghemat Anggaran

BERBANTAH ANGGARAN DAN DATA

BERBAGAI polemik mewarnai penyaluran bantuan sosial untuk 3,7 warga yang terkena dampak Covid-19 di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sorotan para menteri di kabinet Presiden Joko Widodo.

POLEMIK ANGGARAN

2 APRIL. Dalam rapat daring bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Anies menagih kepastian pencairan dana bagi hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 5,1 triliun. Dana tersebut rencananya akan dipakai untuk penanggulangan Covid-19.

17 APRIL. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan DBH belum bisa cair karena laporan keuangan pemerintah masih diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

6 MEI. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak mampu menyalurkan dana bansos untuk 1,1 juta keluarga penerima manfaat.

7 MEI. Anies membantah DKI tak punya dana bansos. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan Rp 5,032 triliun dalam bentuk belanja tidak terduga.

POLEMIK DATA

30 MARET. Rapat koordinasi tingkat menteri menyepakati pembagian tanggung jawab untuk penyaluran bansos untuk 3,7 juta jiwa warga DKI Jakarta. Sebanyak 1,1 juta jiwa akan ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta dan 2,6 juta sisanya akan ditanggung pemerintah pusat.

6 MEI

» Menteri Sosial Juliani Batubara mengatakan penyaluran bansos oleh pemerintah DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal. Belasan titik penyaluran bansos di DKI Jakarta menerima bantuan dobel, yakni dari pemerintah daerah dan Kementerian Sosial.

» Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menegur Anies karena penyaluran bansos tidak sesuai kesepakatan awal.

7 MEI. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi mendistribusikan bahan pokok lebih dulu untuk mengisi kekosongan bantuan. Sebab, pemerintah pusat baru mendistribusikan bantuan pada 20 April, sedangkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI sudah mulai dilaksanakan pada 10 April.

TEKS: MAYA AYU PUSPITASARI

DKI. "Jangan sampai bantuan dari Pemprov dan pusat didapatkan warga, namun ada yang belum mendapatkan sama sekali. Nanti bisa jadi masalah," kata Muhadjir.

Anies menimpali bahwa data yang ada memang betul sama persis. Bantuan juga diberikan kepada orang yang sama, tapi dalam waktu yang berbeda. Bantuan dari DKI mulai disalurkan pada 9 April, sedangkan bantuan Presiden mulai disalurkan sebelas hari kemudian.

Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan, mengatakan pemerintah DKI telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial ihwal penyaluran bantuan yang lebih awal berupa bahan pokok senilai Rp 149.500. "Ketika mulai 20 April (bantuan Presiden) turun, pemerintah DKI menyetop itu," tutur dia.

Polemik tak berakhir begitu saja. Belakangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara. Dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada Rabu, 6 Mei lalu, Sri Mulyani menyebut pemerintah DKI tidak memiliki dana untuk membantu 1,1 juta keluarga. "Mereka tidak ada anggaran dan minta pemerintah pusat untuk cover," kata dia.

Pernyataan Sri Mulyani bertolak dari permintaan pemerintah DKI agar pemerintah pusat segera mengucurkan dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp 5,1 triliun untuk DKI Jakarta. Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan polemik soal bantuan antara pemerintah pusat dan DKI tidak perlu terjadi bila pemerintah Jakarta meminta baik-baik kekurangan dana bagi hasil DBH sebesar Rp 5,1 triliun itu. Pemerintah Jakarta, menurut dia, meminta DBH itu seperti menagih utang yang jatuh tempo.

Kementerian Keuangan, kata Prastowo, mengeriti situasi wabah Covid-19 yang mengakibatkan

pendapatan asli daerah turun. Itulah sebabnya, Kementerian Keuangan mempercepat pencairan sebagian DBH untuk Jakarta, dari biasanya setelah Agustus menjadi April. "Untuk DKI dibayar 50 persen atau Rp 2,5 triliun," kata dia.

Gubernur Anies Baswedan menjelaskan pemerintah DKI mempercepat penyaluran bantuan sosial demi memenuhi kebutuhan pokok warga miskin di Ibu Kota. "Untuk menghindari munculnya kekurangan pangan yang bisa berdampak pada keresahan sosial," kata Anies, Kamis lalu.

Pemerintah DKI, Anies menambahkan, telah menyediakan anggaran dari pos belanja tak terduga sebesar Rp 5,032 triliun untuk penanganan Covid-19. Dana itu dialokasikan untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial—termasuk bantuan sosial. "Uang itu siap digunakan sewaktu-waktu," kata dia.

● LANI DIANA | FAJAR PEBRIANTO
| MAYA AYU